**MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH**

**DI SD NEGERI 234 MATTIROWALIE KECAMATAN KINDANG**

**KABUPATEN BULUKUMBA**

*SCHOOL-BASED QUALITY IMPROVEMENT MANGEMENT AT SDN 234 MATTIROWALIE IN KINDANG SUBDISTRICT OF BULUKUMBA DISTRICT*

**ANDI NURLIA**

**Email: andinurlia.12b14084@yahoo.com**

**ABSTRAK**

The purpose of this study were (i) To examine the implementation of management quality improvement School Based in SD Negeri 234 Mattirowalie District of Kindang Bulukumba, (ii) To determine the factors supporting and hindering the implementation of management quality improvement School Based in SD Negeri 234 Mattirowalie District of Kindang Bulukumba. The research is a qualitative research approach to research is a case study on the level of the school organization. This study describes in depth Based Quality Improvement Management School Elementary School in the District 234 Mattirowalie Kindang Bulukumba. Source of data in this study were determined purposively, by collecting data through interviews and observations were validated through triangulation and member check. The results showed that (i) the implementation of management based quality improvement school in SD Negeri 234 Mattirowalie District of Kindang Bulukumba 2014 has been run in accordance with existing mechanisms, (ii) the factors supporting and hindering the implementation of management based quality improvement of school ie internal factors be a supporting force that is the enthusiasm of the school community in implementing the MBS program, while the disadvantage is less objective components that are involved in data collection. External factors such as opportunities and challenges. As for the odds is because the national nature of this activity, so that this becomes an opportunity for schools to work optimally and utilize the results to develop school, while the challenge is the honesty of the school community in making school-based management.

1. **Pendahuluan**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (MSDM) merupakan kebutuhan mendesak yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah dalam menghadapi era globalisaasi di mana perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat. Harus diakui bahwa yang menjadi pokok permasalahan pendidikan di Indonesia adalah kinerja manajemen ini ditenggarai sebagai salah satu factor yang memiliki potensi dalam mempengaruhi dunia pendidikan yang meliputi berbagaisuber daya pendidikan yang terkait dengan mutu output yang dihasilkan.

Era reformasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan. Salah satu perubahan mendasar yang digulirkan saat ini adalah manajemen Negara, yaitu dari Manajemen Sentralistik ke Manajemen berbasis daerah. Secara resmi perubahan ini diwujudkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Konsekuensi logis dalam Undang-Undang tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengnan jiwa dan semangat otonomi Daerah.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara menyempurnakan system pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak meupun perangkat keras. Upaya tersebut, antara lain dikeluarkannya Undang-Undang No 22 dan 25 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah serta diikuti oleh penyempurnaan Undang-Undanag sistem Pendidikan Nasional, yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Dengan perubahan paradigma dari top-down ke bottom-up atau desentralisasi dalam wujud pemeberdayaan sekolah, yang meyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan sedapat mungkin keputusan harus dibuat oleh mereka yang berada di garis depan, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yaitu kepala sekolah dan guru.

Organisasi sekolah berjalan karena adanya konsep manajemen yang terstruktur. Manajemen dalam organisasi sekolah sering disebut dengan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan diartikan pula Administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ialah segenap proses penyerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan (Purwanto, 2008). Di dalam proses administrasi pendidikan segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasiikan, dan dikoordinasii secara efektif, dan semua materi yang diperlukan, dan yang telah ada dimanfaatkan secara efesien.

Administrasi pendidikan sebagai ilmu mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ilmu administrasi lainnya seperti dikatakan oleh dr Sodik A. Kuntoro perbedaan administasi pendidikan dengan administrasi lainnya terletak pada prinsip-prinsip operasionalnya, dan bukan pada prinsip-prinsip umumnya. Setiap kegiatan di dalam proses administrasi pendidikan di arahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tergambar dalam kurikulum sekolah masing-masing. Adanya unsur tujuan ini menimbulkan perlunya pengadministrasian pelaksanaan kurikulum yang menjadi tugas dan tanggung jawab kepala sekolah bersama guru-guru dan pegawai sekolah lainnya. Dalam pendidikan  ini diperluakan pula adanya koordinasi dan pengawasan atau supervisi yang baik dari pimpinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adminstrasi pendidikan mencakup bidang-bidang garapan yang sangat luas, seperti administrasi personal, administrasi kurikulum, kepemimpinan, kepengawasan, atu supervise pendidikan administrasi bisnis pendidikan, organisasi lembaga pendidikan, dan sebagainya.

Administrasikan pendidikan atau administrasi sekolah tidak hanya berkaitan dengan sosal-soal tata usaha sekolah tapi juga berkaitan dengan semua kegiatan sekolah baik mengenai materi, personal, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum, dan sebagainya yang harus diatur sehingga menciptakan suasana yang memmungkinkan, terselenggaranya kondisi-kondisi belajar-mengajar yang baik sehingga mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu, diperlukan orang-orang yang cakap dan memiliki pengertian yang luas tentang pelaksanaan dan tujuan sekolah. Suatu sekolah dapat berjalan dengan baik dan berarah jika setiap tahun sekolah menentukan dan membuat terdahulu rencana dan kebijakan yang akan dijalankan pada tahun itu. Juga informasi-informasi yang menunjukkan bagaimana rencana dan kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik hendaknya dikumpulkan. Proses administrasi pendidikan meliputi fungsi-fungsi perencanaan organiasasi, koordinasi, supervisi kepengawasan, atau pembiayaan, dan evaluasi.

Sekolah dasar tidak ubahnya sebagai sebuah institusi atau lembaga. Sebagai sebuah institusi atau lembaga, sekolah mengemban misi tertentu yaitu melakukan proses edukasi, proses sosialisasi, dan proses transformasi anak didik, dalam rangka mengantarkan mereka siap mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Oleh karena demikian misinya, maka sekolah dasar dapat dikategorikan sebagai institusi atau lembaga pendidikan. Sebagai institusi atau lembaga pendidikan, sekolah dasar menyelenggarakan berbagai aktivitas pendidikan bagi anak didik dan melibatkan banyak komponen, sehingga aktivitas maupun komponen pendidikan di sekolah dasar menuntut adanya manajemen yang baik dalam rangka mencapai tujuan institusional sekolah dasar.

Sementara dalam pelaksanaan semua aktivitas pembelajaran di atas dilibatkan banyak komponen, tidak saja komponen manusia melainkan juga komponen bukan manusia. Komponen manusia di sekolah dasar cukup banyak. Dalam kondisi normal komponen manusia sekolah dasar terdiri dari seorang kepala sekolah, enam orang guru kelas, seorang guru mata pelajaran Pendidikan Agama, seorang guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan seorang pesuruh sekolah. Jadi secara keseluruhan terdapat sepuluh personil sekolah dasar. Sedangkan komponen bukan manusia di sekolah dasar terdiri dari enam ruang kelas, satu ruang kepala sekolah yang juga difungsikan sebagai ruang administrasi, buku teks, buku penunjang, buku bacaan, berbagai alat peraga, dan uang. Agar dapat didayagunakan secara optimal dalam mencapai tujuan institusional sekolah dasar, semua komponen tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak personil dan fasilitas yang didayagunakan semakin menuntut adanya manajemen sekolah dasar yang baik.

Berbagai permasalahan seperti yang penulis ungkapkan di atas mengindikasikan lemahnya sistem manajemen pembelajaran, maka kami akan melakukan, maka perlu melakukan penelitian mengenai manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SD Negeri 234 Mattirowalie Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah gambaran pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah pada SD Negeri 234 Mattirowali Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba? (2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SD Negeri 234 Mattirowalie Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SD Negeri 234 Mattirowalie Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SD Negeri 234 Mattirowalie Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan Nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatalan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan diri dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didika agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demikratis serat bertanggung jawab.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (MSDM) merupakan kebutuhan mendesak yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah dalam menghadapi era globalisaasi dimana perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat. Harus diakui bahwa yang menjadi pokok permasalahan pendidikan di Indonesia adalah kinerja manajemen ini ditenggarai sebagai salah satu factor yang memiliki potensi dalam mempengaruhi dunia pendidikan yang meliputi berbagaisuber daya pendidikan yang terkait dengan mutu output yang dihasilkan.

Era reformasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan. Salah satu perubahan mendasar yang digulirkan saat ini adalah manajemen Negara, yaitu dari Manajemen Sentralistik ke Manajemen berbasis daerah. Secara resmi perubahan ini diwujudkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Konsekuensi logis dalam Undang-Undang tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengnan jiwa dan semangat otonomi Daerah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara menyempurnakan system pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak meupun perangkat keras. Upaya tersebut, antara lain dikeluarkannya Undang-Undang No 22 dan 25 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah serta diikuti oleh penyempurnaan Undang-Undanag sistem Pendidikan Nasional, yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Dengan perubahan paradigma dari top-down ke bottom-up atau desentralisasi dalam wujud pemeberdayaan sekolah, yang meyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan sedapat mungkin keputusan harus dibuat oleh mereka yang berada di garis depan, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yaitu kepala sekolah dan guru.

Pendidikan harus mampu melayani, beradaptasi dan bahkan juga ikut menentukan dunia secara makro yang selalu maju dengan cepat. Sayangnya menurut Otzold (Sindhunata 2000: 12) dibandingkan dengan lembaga¬ lembaga yang terkait dengan bisnis dan perdagangan, sekolah termasuk lembaga yang paling rendah untuk berubah.

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. *Pertama* strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production function (Hanushek, 1979,1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya teljadi dalam institusi ekonomi dan industri. *Kedua,* pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.( Umaedi: 1999).

Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan sudah dilakukan oleh pemerintah atau inisiatif dari pihak sekolah sendiri. Salah satu untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sekolah menerapkan manajemen ISO 9001 –2000. Dengan penerapan suatu sistem manajemen mutu ISO 9001 – 2000 tentunya sekolah akan membawa dampak positif bagi layanan pendidikan, yaitu meningkatkan dan menjamin mutu dari lulusan atau layanan yang dihasilkan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap produk atau layanan. Hal ini juga akan berpengaruh positif terhadap kinerja sekolah yaitu akan terhindarnya pemborosan anggaran, meminimalisasi biaya-biaya, dan pada akhirnya adalah meningkatnya keuntungan sekolah secar•a signifikan.

Menurut Kepmendikbud No. 0531012001 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekolah harus memiliki persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan dengan serba lengkap dan cukup seperti, luas lahan, perabot lengkap, peralatan/laboratorium/media, infrastruktur, sarana olahraga, dan buku rasio 1:2. Kehadiran Kepmendiknas itu dirasakan sangat tepat karena dengan keputusan ini diharapkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak “kebablasan cepat” atau “keterlaluan tertinggal” di bawah persyaratan minimal sehingga kualitas pendidikan menjadi semakin terpuruk.

Kepmendiknas No. 044/U/2002 dan UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 56 ayat (1). Dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, ayat (2) Dewan pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis, dan ayat (3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

**Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Mutu Pembelajaran**

Untuk meningkatkan mutu sekolah seperti dapat menggunakan yang disarankan oleh Sudarwan Danim (2007: 56), yaitu dengan melibatkan lima faktor yang dominan :

1. Kepemimpinan Kepala sekolah; kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.
2. Siswa; pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat “ sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.
3. Guru; pelibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kopmetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, MGMP, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan disekolah.
4. Kurikulum; adanya kurikulum yang tetap tetapi dinamis , dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals (tujuan ) dapat dicapai secara maksimal,
5. Jaringan Kerjasama; jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan / instansi sehingga output dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja

Berdasarkan pendapat diatas, perubahan paradigma harus dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan dan karyawan sehingga mereka mempunyai langkah dan strategi yang sama yaitu menciptakan mutu dilingkungan kerja khususnya lingkungan kerja pendidikan. Pimpinan dan karyawan harus menjadi satu tim yang utuh (teamwork ) yangn saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan yang ada sehingga target (goals ) akan tercipta dengan baik.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Merujuk pada tulisan Moleong (2012: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba, tepatnya pada SD Negeri 234 Mattirowalie Kecamatan kindang Kabupaten Bulukumba.

1. **Pelaksanaan MPMBS**

SD Negeri 234 Mattirowalie dalam melakukan pembangunan pendidikan dengan pola Manajemen berbasis Sekolah (MPMBS) dalam Fungsi-fungsi manajemen sekolah yang didesentralissikan berdasarkan prinsip, karakteristik dan strateginya dilaksanakan melalui mekanisme yang sederhana namun tetap menjunjung tinggi rasa keberlembagaan dan berorientasi kepada pelaksanaan program-program sekolah yang progresif yang diaspirasikan dari kebutuhan lokalitas dengan tujuan sentralnya adalah lahirnya hasil-hasil pendidikan yang berpihak kepada pengembangan siswa dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

1. Pelaksanaan MPMBS dalam fungsi-fungsi manajemen sekolah dilihat dari prinsipnya

Pelaksanaan MPMBS dalam Sembilan komponen yang didesentralisasikan di sekolah yang mencakaup : perencanaan dan evaluasi, pengelolaan proses pembelajaran, pengembanagn kurikulum, pengeloaan biaya, sarana dan prasarana, peneglolaan kesiswaan, penegelolaan ketenagaan, partispasi masyarakat, dan iklmi sekolah. Selanjutnya sembilan fungsi-fungsi desentralisasi MPMBS tersebut dijadikan materi kajian dalam penelitian ini.

Dalam konsep MPMBS berdasarkan prinsipinya ada tiga hal pokok yang menjadi subtansi kajiannya, yakni mengenai hak otonomi yang dimiliki oleh sekolah, menyangkut persolaan keluwesan-keluwesan satuan pendidikan dalam mengambil keputusan, dan sejauh mana tingkat partisipasi para stakeholder dalam membangun Sekolah. Hal tersebut sesuai dengan yang dutulis oleh Saifuddin (2008), yang mengatakan bahwa prinsip-prisnsip MPMBS itu terdiri dari prinsip otonomi, prinsip fleksibilitas, dan prinsip partisipatif.

 Dari ketiga prinsip pokok dalam MPMBS tersebut jika dikorelasikan dengan realitas pendidikan di SD Negeri 234 Mattirowalie, maka dapat dikatakan bahwa dari tiga prinsip itu telah merambah ke dalam rana kebijakan yang dibuat di sekolah tersebut. Untuk hal itu, Berikut dibahas fungsi-fungsi pengelolaan yang didesentralisasikan di sekolah dalam hubungannya dengan prinsip, karakteristik, dan strategi MPMBS.

1). Perencanaan MPMBS

SD Negeri 234 Mattirowalie sebagai sekolah yang menjadi sekolah dasar negeri pertama yang didirikan di Desa Mattirowalie dalam setiap akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah, senantiasa diawali dengan perencanaan yang dilakukan secara otonom dengan mekanisme kebersamaan yaitu dengan melibatkan semua tenaga kerja sekolah dalam setiap pembahasan agenda sekolah yang akan dilaksanakan. Perencanaan sekolah tersebut dilakukan dengan agenda materinya tetap didasarkan kepada segala hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan utama yang diperlukan oleh sekolah dalam upaya membangun mutu.

Kemudian menyangkut evaluasi program yang dilaksanakan di SD Negeri 234 Mattirowalie sesuai data yang diperoleh menggambarkan bahwa di SD Negeri 234 Mattirowalie setiap selesai dari suatu kegiatan yang diadakan atau diprogramkan oleh sekolah senatiasa dilakukan rapat evaluasi dalam rangka menilai dan mengetahui pencapain hasil dari setiap agenda sekolah yang telah dilaksanakan.

Evaluasi program yang dilakukan di sekolah dimaksudkan untuk mengetahui seajauh mana tingkat kesuksesan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan evaluasi terhadap beragam program tersebut dilaksanakan oleh sekolah sendiri dengan cara membuat laporan kegiatan yang disampaikan dalam pertemuan yang dilaksankan di sekolah dan dihadiri oleh seluruh pegawai sekolah, Sementara komite dan perwakilan orang tua tidak selamanya hadir dalam setiap rapat evaluasi. Akan tetapi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah dilaporkan setiap pertemuan diakhir tahun ajaran dengan mengundang komite sekolah dan orang tua siswa.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan, maka diambil suatu tundak lanjut berupa keputusan baru sehubungan dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Dan dari hasil evaluasi ini kemudian dijadikan landasan dalam pembuatan agenda sekolah ke depannya dan agenda-agenda tersebut dilakukan dengan melalui analisis kesiapan sekolah dalam menyonsong setiap rencana yang akan dilakukan.

2). pengelolaan Proses Pembelajaran

Sejauh ini pembelajaran yang inovatif, PAKEM, partispatif belum berjalan sesuai dengan konsep MPMBS secara maksimal, karena masih terdapat diantara guru yang membuat RPP mengacu kepada edaran RPP dari Dispora setempat sehingga dalam menetapkan metode,strategi, dan pendekatan pembelajaran hanya didasarakan kepada rancangan RPP edaran tersebut yang memuat metode dan strategi ajar secara umum dan tidak dilandaskan kepada kondisi lokal dari satuan pendidikan bersangkutan. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dari strukutur dan perangkat penunjang yang terdapat dalam RPP yang ditelaah. Hal ini disebakan antara lain kompetensi sebagian guru yang masih minim serta sarana penunjang yang masih kurang.

Sebagian guru di SD Negeri 234 Mattirowalie mengajar masih dengan cara konvensional karena mereka dalam mengajar hanya merujuk kepada buku ajar yang menjadi pegangan guru mata pelajaran. kemudian buku ajar tersebut dijadikan acuan utama dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yang disampaikan dengan cara mendikte siswa untuk menulis isi dari buku tersebut.

3). Pengelolaan pengembangan kurikulum

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap dokumen berupa kurikulum SD Negeri 234 Mattirowalie ditemukan bahwa sekolah tersebut memiliki visi, misi dan tujuan sekolah yang selalu diupayakan untuk direalisasikan. Selain itu muatan kurikulum sekolah telah memuat beberapa hal yang terdiri dari; mata pelajaran, muatan lokal, penegmbangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis lokal dan global. Dan juga memuat kalender pendidikan sebagai pedoman sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di SD Negeri 234 Mattirowalie.

4). Gambaran pengelolaan ketenagaan

Fenomena pengelolaan ketenagaan yang terlaksana di SD Negeri 234 Mattirowalie dilihat dari prinsip MPMBS dapat dinyatakan bahwa dalam hal perekrutan dan pengangkatan tenaga honor di sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah selaku pimpinan dan diputuskan berdasarkan kepada pertimbangan para bawahannya kemudian dilaksanakan dengan melihat tingkat kebutuhan-kebutuhan personil yang diperlukan oleh sekolah baik dari segi jumlah kebutuhan tenaga maupun dari sektor pekerjaan yang masih kekurangan tenaga.

Perekrutan dan penempatan tenaga kerja sekolah di SD Negeri 234 Mattirowalie diasumsikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik dan pegawai lainnya yang dimiliki sekolah saat ini. Tujuannya secara umum adalah untuk memberi efek efesiensi dan efektifitas kerja dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Kemudian dalam hal pengembangan ketenagaan ditempu beberapa cara seperti mengikutsertakan tenaga pendidik dalam beberapa kegiatan pelatihan dan pengembangan diri yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan setempat. Sementara untuk kebijakan pengembangan ketenagaan secara lokal sejauh ini belum ada skedul permanen yang ditetapkan sekolah sehingga hanya dapat dilakukan secara tidak terprogram oleh kepala sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Cara pengembangan personil lainnya, dilakukan dengan mengeluarkan instruksi lisan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada seluruh guru dan pegawai agar dapat menjadi menjadi tutor sebaya dalam segala aspek pengembangan sumber daya manusia.

Demikian pula halnya mengenai pembinaan kedispilinan pegawai dilakukan dengan membuat absensi harian guru dan staf dan pembinaan dalam bentuk arahan dari kepala sekolah kepada seluruh pegawai setiap upacara bendera hari senin. Kemudian dalam sektor penilaian tenaga kerja sekolah khsusunya bagi personil yang berstatus pegawai negeri, dilakukan dengan membuat daftar penilaian (DP3) berdasarkan beberapa indicator penelaian.

5). Pengelolaan sarana-prasarana

Opimalisasi ketersediaan sarana-prasarana di SD Negeri 234 Mattirowalie pada dasarnya senatiasa diupayakan semaksimal mungkin disesuaikan dengan ketentuan dalan SNP, akan tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki sekolah dan banyaknya faktor-faktor penunjang yang mesti tersedia yang belum mampu dipenuhi oleh sekolah sehingga maksimalisasi keterpenuhan fasilatas sekolah masih sulit untuk direalisasikan.

Mulyasa (2012: 50) mengungkapkan bahwa kegiatan pengelolaan sarana-prasarana meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Saifuddin (2008: 2-35) bahwa pengelolaan fasilitas sekolah mencakup pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan. Dari uraian di atas, dalam hubungannya dengan mekanisme pengelolaan sarana-prasarana sekolah dengan prinsip MPMBS di SD Negeri 234 Mattirowalie dilaksanakan melalui perencanaan awal yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah. Dalam Perencanaan itu dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh warga sekolah untuk bersama-sama menentukan item pengadaan fasilitas sekolah yang tergolong sebagai kebutuhan dan bersifat esensial bagi penyelenggaraan pembelajaran di sekolah.

Dalam rangka menjaga keterpeliharaan seluruh fasilitas yang dimiliki sekolah maka ditunjuk salah seorang dari pegawai sekolah yang bertugas untuk mengontrol seluruh sarana yang ada. Dalam hal ini, Mulyasa (2012: 49) menegaskan bahwa “manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan”.kemudian sarana tersebut diinventarisasi dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan bagi fasilitas yang rusak dan bila memungkinkan akan dilakukan penyortiran terhadap barang-barang yang sudah tidak layak pakai.

6). Pengelolaan pembiayaan.

Manajemen anggaran sekolah yang berlangsung di SD Negeri 234 Mattirowalie dilaksanakan dengan mengacu kepada keempat tahap sebagaimana yang diutarakan oleh mulyasa di atas. Penyusunan anggaran dibuat dengan merumuskan rencana anggaran sekolah yang dibuat setiap tahun ajaran. Dalam penyusunan rencana anggaran tersebut, dilaksanakan secara partispatif dari seluruh warga sekolah walupun sebelum dilakukan pergantian pimpinan sekolah prinsip partisipatif dalam perencanaan anggaran sekolah di SD Negeri 234 Mattirowalie belum berjalan maksimal. Hal itu, disebabkan oleh kepemimpinan kepala sekolah yang tidak meliahat bawahannya sebagai parner berfikir dalam setiap merencanakan sesuatu khususnya dalam perencanaan anggaran sekoah.

Penyusunan rencana anggaran di SD Negeri 234 Mattirowalie dalam paradigm kekinian telah disentuh dengan budaya partispatif dari warga sekolah dalam setiap penetapannya meskipun dalam hal ini partispasi dari komite sekolah dan perwakilan orang tua siswa belum terlihat secara nyata. Keadaan demikian terajadi karena persepsi masyarakat tentang sekolah yang relatif masih dalam tataran awam kemudian bangunan komunikasi sosial dari sekolah yang masih lemah sehingga tidak mampu menstimulus masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan pendidikan.

Dalam menetapkan rencana dan penggunaan anggaran sekolah di SD Negeri 234 Mattirowalie dilakukan secara luwes yang disesuaikan dengan faktor-faktor yang menjadi tuntutan kebutuhan bagi sekolah dalam rangka menunjang kelancaran proses pendidikan yang efektif. Kemudian menyangkut pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran, kepala sekolah selaku otorisator bertugas mengawasi dan mengontrol setiap pengelolaan anggaran agar tidak mengalimi kebocoran. Karena dalam hal penggunaan anggaran, sekolah membuat laporan kepada dinas pendidikan sebagai lembaga yang menaunginya untuk dipertanggungjawabkan.

**7)**  **Pelaksanaan MPMBS dilihat dari karakteristiknya**

1. Input pendidikan

Salah satu hal yang sering diasumsikan sebagai faktor kelemahan yang terdapat di SD Negeri 234 Mattirowalie adalah kualitas dari tenaga staf yang relatif masih rendah. Hal ini kemudian menyebabkan tidak efesiennya pekerjaan di sekolah dan sering menimbulkan keluhan dari bebarapa guru yang kadang harus mengambil alih tugas yang menjadi domain staf. Rendahnya kualitas staf tersebut, antara lain karena dipengaruhi oleh level pendidikan yang dimiliki oeh seluruh staf yang hanya berijaza SMU, rendahnya semangat belajar karena pengaruh usia, dan sumber belajar yang terbatas.

SD Negeri 234 Mattirowalie pada hakikatnya tergolong sebagai sekolah yang selalu memiliki harapan besar untuk dapat meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Hal ini didasarkan kepada muatan kurikulum yang dicanangkan oleh sekolah dengan menetapkan beberapa target sasaran agar dapat memperoleh prestasi tinggi baik prestasi dibidang akademik maupun non akademik. Selanjutnya terkait dengan masalah input pendidikan dari sisi fokus pada pelanggan, dapat dilihat dari berapa program yang diagendakan sekolah senatiasa menempatkan siswa sebagai obyek utama dalam menyelenggarakan pendidikan yang diarahkan agar seluruh siswa dapat memiliki kecakapan kognitf, afektif, dan psikomotorik.

b). Proses pendidikan

Salah satu indikasi bahwa karakteristik MPMBS telah berjalan di SD Negeri 234 Mattirowalie adalah dapat dilihat dari situasi dan kondisi lingkungan sekolah yang aman, tertib dan damai. Hal ini dipicu oleh kesadaran dari semua warga sekolah untuk konsisten dalam mengawal budaya hormat-menghormati, saling menghargai, dan menjaga rasa persaudaraan dengan membina hubungan atas rasa kekeluargaan. Dan juga tetap berupaya untuk meningkatkan mutu hasil-hasil pendidikan.

Kemudian dari aspek kewenangan, traparansi, dan kerja sama. Sekolah secara umum memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam merencanakan dan memutuskan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Akan tetapi dalam keterbukaan sekolah khususnya dalam pengelolaan anggaran masih dalam tahap perbaikan mutu, namun dari sisi kerjam sama dengan masyarakat yang masih sangat rendah akan tetapi kerja sama khusus antar warga intern sekolah senantiasa berlangsung apik.

Kurang intimnya dan tidak variatifnya komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh sekolah dalam hubungannya dengan masyarakat dan komite sekolah sehingga berpengaruh terhadap rendahnya keterlibatan, peran, sumbangsi, dan keterlibatan komite sekolah dan masyarakat secra umum dalam penyelenggaraan pendidikan yang kolaboratif di sekolah.

1. Output pendidikan

Menurut Saifuddin (2008: 2-20), Dalam MPMBS karaketeristik output sekolah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu prestasi akademik seperti hasil NEM dan hasil-hasil lomba-lomba ilmiah yang kedua adalah prestasi non akademik seperti kedisipilinan, kerajinan, prestasi olahraga dan seni, dan kepramukaan.

Pada hakikatnya secara konsep, SD Negeri 234 Mattirowalie dalam mewujudkan pendidkan yang bermutu dan berprestasi telah merumuskan beberapa program traget prestasi sekolah akademik dan non akademik serta program pembinaan yang dapat mendorong siswa untuk berprestasi akan tetapi dalam tataran praktiknya program-program tersebut tidak teraplikasi dengan maksimal.

Sejauh ini prestasi dari bidang akademik siswa jika dilihat dari hasil ujian nasional, dapat dikatakan bahwa SD Negeri 234 Mattirowalie tergolong sekolah yang sukses karena seluruh siswa yang mengikuti ujian dari tahun ketahun di sekolah tersebut selalu mengalami kelulusan dengan persentase 100%. Akan tetapi prestasi akademik dalam bentuk lomba-lomba akademik antar sekolah tingkat kabupaten yang pernah diiukuti oleh siswa dari sekolah ini belum pernah meraih sekalipun juara.

Dari hasil pengamatan dan keterangan informan, rendahnya atau belum adanya prestasi yang diraih siswa di SD Negeri 234 Mattirowalie karena disebabkan oleh motifasi belajar siswa yang rendah dan juga bimbingan dan pembinaan dalam bidang akademik yang dilakukan oleh sekolah yang tidak maksimal.

Prestasi non akademik siswa SD Negeri 234 Mattirowalie boleh dikata sedikit lebih baik dari prestasi akademik karena ini dapat dilihat dengan keberhasilan siswa meraih beberapa juara dalam lomba porseni yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten, khususnya dalam lomba atletik.

1. MPMBS dilihat dari strateginya

 Berbicara mengenai strategi implemnetasi MPMBS yang terlaksana di SD Negeri 234 Mattirowalie dilakukan dengan merujuk kepada penjelasan Nurhalis (2003: 132) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan MPMBS dapat dilakukan dengan Sembilan strategi. Dari Sembilan stratgei pelaksanaan yang dipaparkan Nurhalis di atas, jika ditelusuri dari sisi tingkat faktualisasinya di SD Negeri 234 Mattirowalie maka pada beberapa komponen telah dilaksnakan walaupun pada komponen laninnya belum terlaksana secara maksimal. Sebagaimana data yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa *sosialisai MPMBS* di sekolah tersebut terlaksana dengan diawali dari ikutsertanya kepala sekolah pada beberapa pelatihan MPMBS yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten dan pelatihan yang diprakarsai oleh dinas propinsi, demikian halnya dengan ketua komite sekolah yang telah pernah mengikuti pelatihan MPMBS yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten. Dari bekal pelatihan yang didapatkan oleh kepala sekolah dan ketua komite diharapkan sosialisasi MPMBS dapat diteruskan kepada stakeholder lainnya yang belum sempat ikut dalam pelatihan itu.

Bagi tenaga pendidik, Sosialisasi MPMBS dilakukan dengan diikutsertakannya semua guru yang berstatus pegawai negeri dalam pelatihan pembuatan dan penyusunnan RPP yang bernuansa MPMBS yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten, akan tetapi pelatihan tersebut menurut para guru belum cukup bagi mereka untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan konsep MPMBS seperti pembelajaran dengan pendekatan PAKEM dan CTL. sosialisasi MPMBS kepada Masyarakat sejauh ini belum pernah diagendakan secara khusus akan tetapi sosialisasinya kepada orang tua dilakukan ketika mereka hadir disekolah disaat ada kegiatan yang dilaksanakan dengan mengundang seluruh orang tua siswa, pemerintah dan toko masyarakat setempat.

Sementara karakteristik *otonom* yang dimiliki oleh sekolah SD Negeri 234 Mattirowalie dapat dilihat dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh sekolah dalam merencanakan atau menetapkan keputusan segala hal terkait dengan sekolah, dalam proses pembelajaran guru membuat RPP dengan metode dan strategi ajar yang ditentukan sendiri, pengembangan kurikulum yang di putuskan oleh sekolah berdasarkan analisis interenal, demikian halnya dalam perencanaan dan pengadaan sarana sekolah, perekrutan honorer sekolah, pengelolaan keuangan sekolah dan manajemen pelayanan siswa yang dilaksanakan secar mandiri oleh sekolah.

Selanjutnya dari segi peran serta masyarakat (PSM) yang dinstitusionalisasikan dengan pembentukan komite sekolah dalam keterlibatannya terhadap pembangunan pendidikan di SD Negeri 234 Mattirowalie, dikategorikan masih sangat rendah. Hal tersebut diasumsikan belum adanya karya nyata dari masyarakat baik fisik maupun non fisik yang dikontribusikan ke sekolah, demikian pula pengurus komite sekolah yang tidak memiliki program kerja yang jelas baik dalam fungsinya sebagai pendukung, pemberi pertimbangan, dan partispasi konkrit maupun selaku komunikator dengan pemerintah dalam rangka membangun sekolah.

Kemudian karakteristik MPMBS dilihat dari *kepemimpinan* kepala sekolah SD Negeri 234 Mattirowalie dipersepsikan oleh bawahanya sebagai modal dalam membangun pendidikan sekolah kearah yang lebih produktif akan tetapi secara adminstrasi kinerja pejabat kepala sekolah saat ini berdasarkan pengamatan peneliti terhadap dokumnetasi sekolah belum mencapai level yang sempurna sehingga mutlak belum dapat dijadikan garansi untuk dapat melaksanakan tugas kepemimpinan secara sempurna.

Selanjutnya mengenai *pengambilan keputusan* di SD Negeri 234 Mattirowalie dapat dikatakan berjalan sesuai dengan karakteristik MPMBS, yakni hampir seluruh keputusan yang ditetapkan di sekolah dilakukan dengan mengikutsertakan semua pegawai sekolah dalam proses penetapannya. Melibatkan semua warga sekolah untuk berpartispasi dalam rapat sekolah dalam bentuk sumbangsi ide, tenaga, waktu, dan pelaksanaan kegiatan., menjadi indikasi bahwa nuansa demokratis dalam pengambilan keputusan telah terinternalisasi dalam roda pendidikan di SD Negeri 234 Mattirowalie.

Dari faktor *ketenagaan*, dalam rangka untuk memaksimalkan sumber daya tenaga yang dimiliki sekolah maka dibuat surat keputusan pembagian tugas yang diberikan kepada masing-masing pegawai yang telah ditunjuk dan disepakati untuk bertanggungjawab dalam pekerjaan tertentu, gambaran pekerjaan masing-masing pegawai disertakan dalam surat keputusan itu kemudian diperjelas lewat penyampaian kepala sekolah kepada semua personil yang dimandatir untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sedangkan terkait dengan *akuntabilitas dan transparansi* sekolah sehubungan dengan kegiatan dan laporan anggaran sekolah kepada masyarakat diasumsikan belum maksimal, indikasinya antra lain ; papan informasi sumber dan alokasi anggaran sekolah yang tidak pernah diperbaharui sejak tahun ajaran 2010/2011, sosialisai secara khusus kepada masyarkat mengenai sumber, penggunaan dan sumber anggaran sekolah belum pernah dilkasanakan oleh sekolah. Untuk laporan yang ditujukan ke dinas pendidikan dilakukan dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan dan petunjuk pelaporan dana sekolahi.

Aspek *kurikulum* berdasarkan pengamatan terhadapa kurikulumSD Negeri 234 Mattirowalie 2013/2014, diasumsikan bahwa kurikulum di sekolah tersebut telah mengarah kepada penerapan konsep MPMBS yakni diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah, khususnya peningkatan prestasi belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari program sekolah berupa pendidikan kecakapan hidup yang meliputi kecakapan personal, social, akademik, dan kecakapan vokasional.

Walaupun secara factual konsep-konsep tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal karena diasumsikan masih terdapat banyak hambatan dan keterbatasan yang dimiliki oleh sekolah sehingga sampai hari ini belum difaktualisasikan di sekolah namun secara perlahan program-program yang telah dicanangkan itu diupayakan untuk dilaksanakan.

1. **Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan MPMBS.**

Menurut Nurkholis (2003: 264) factor-faktor pendukung dari keberhasilan pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) terdiri dari enam factor yaitu: Political Will, Financial, sumber daya manusia, budaya sekolah, kepemimpinan, dan keorganisasian. Sehubungan dengan hal itu, diantara berdasarkan hasil data yang diperoleh dari informan terdapat beberapa faktor yang menjadi komponen pendukung dalam pengpelaksanaanan nilai-nilai MPMBS di SD Negeri 234 Mattirowalie antara laian:

**a. Faktor internal**

1). Kekuatan

a) Kepemimpinan kepala sekolah. Nurkholis (2003: 163) mengatakan kepemimpinan yang efektif dapat dicapai apabila kepala sekolah memiliki kemampuan professional, memiliki bakat atau sifat kepemimpinan yang efektif, dan dapat memahami lingkungan sekolah secara holistic dalam kepemimpinannya.

Pergantian pejabat kepala sekolah di SD Negeri 234 Mattirowalie, menjadi harapan bagi segenap warga sekolah untuk mewujudkan suasana kerja sekolah yang lebih baik. salah satu faktor yang menstimulasi munculnya harapan dari warga sekolah karena pejabat sekolah baru dianggap sebagai sosok yang mampu melahirkan perubahan signifikan bagi perkembangan sekolah, karena tingkat kerajinan dan keberadaan pimpinan di sekolah akan sangat berpengaruh terhadap seluruh efektifitas kerja di sekolah. Kepala sekolah akan selalu menjadi tauladan dan patron kerja bagi para bawahan dan apapun yang dilakukan olek pimpinan akan berdampak pada etos kerja bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal itu, salah satu yang menjadi istimewa dari pejabat sekolah yang baru adalah mampu memberi efek positif kepada seluruh tenaga kerja sekolah berupa mereka semakin rajin dan semakin termotivasi untuk berdisiplin dalam bekerja di sekolah karena kepala sekolah selalu berada di sekolah.

Salah satu yang turut menjadi faktor pendukung dalam kaitannya dengan kepemimpinan adalah tempat tinggal menetap kepala sekolah yang berada di sekitar lingkunan sekolah, karena diasumsikans semakin dekat tempat tinggal kepala sekolah dengan sekolah maka akan memungkinkan pengawasan dan perhatian terhadap semakin intens dan maksimal dan semakin jauh jarak sekolah dengan rumah tinggal maka akan berdampak pada rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap sekolah.

Selain jarak rumah, salah satu yang menjadi nilai tambah dari kepemimpinan kepala sekoah yang turut mendukung termiplementasinya nilai-nilai MPMBS di SD Negeri 234 Mattirowalie adalah adanya motivasi, wejangan, dan informasi yang terkait dengan tugas yang sering diberikan kepada para bawahannya agar dapat menjadi pekerja pendidikan yang berkualitas.

b). Budaya sekolah yang kondusif. Pada masa orde baru atau disaat system pendidikan nasional masih menganut pola sentralistik dalam setiap kebijakan pendidikan di sekolah, secara umun budaya yang termanifestasi di sekolah adalah budaya yang berasaskan instruksi dari pusat. sekolah hanya menjadi eksekutor dari setiap keputusan-keputusan yang telah dirumuskan oleh komunitas atau lembaga yang tidak terkait langsung dengan sekolah. Peralihan tata kelola pendidikan kearah desentralisasi membawa perubahan signifikan bagi dunia pendidikan khususnya dise kolah. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan membuat keputusan secara otonom adalah sebuah fenomena yang mampu menciptakan budaya sekolah yang positif dan mampu mendongkrak produktifitas sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.

SD Negeri 234 Mattirowalie dalam menyelenggarakan pendidikan ditempuh dengan berpatron kepada budaya yang menganut nilai-nilai desentralisasi seperti otonom, fleksibel, dan partispatif. Hal itu, senantiasa diupayakan untuk dijadikan prinsip dalam mengelolah pendidikan yang efektif disekolah. Selain itu, budaya saling menghargai, hormat-menghormati, dan hubungan yang dilandasi rasa kekeluargaan menjadi bagian dari kebiasaan yang terus diejawantahkan dalam seluruh aktifitas sekolah. Pembiasaan dan kebiasaan tersebut yang kemudian menjadikan diantara para pekerja pendidikan di sekolah senantiasa larut dalam suasana kerja yang harmonis ada konflik yang dapat meretas nuansa kebersamaan dalambekerja sehingga mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tentram, dan damai.

2) Kelemahan

a) Kuliatas SDM yang rendah. Saifuddin (2008: 3-8) mengatakan, “sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan MPMBS” pernyataan tersebut bukanlah merupakan sebuah statemen yang asing didengar karena pada hekekatnya semua pekerjaan yang melibatkan tenaga manusia didalamnya, kesuksesannya sangat bergantung kepada level kualitas kecakapan manusia yang dimilikinya. Demikian pula dalam implemenasi MPMBS di SD Negeri 234 Mattirowalie, kualitas tenaga kerja yang dimilikinya saat ini dikategorikan belum mampu menunjang optimalisasi penerapan manajmen sekolah dengan system MPMBS.

Terdapatnya sebagian besar guru yang belum mampu menerapakn pembelajan yang kreatif dan inovatif serta belum mampu mengoperasikan computer secara mahir menjadi indikasi keterbelakangan SDM yang dimiliki sekolah saat ini. Selain itu, rendahnya pengetahuan dan pengalaman para pegawai staf terutama dalam tugas-tugas administrasi sekolah turut menjadi faktor yang membuat pekerjaan disekolah terhambat sehingga maksimalisasi pelaksanaan karakteristik MPMBS masih sulit untuk dicapai.

b) Kurangnya jumlah tenaga pendidik. Tenaga pendidik atau guru merupakan sektor sentral dalam penyelenggaran pendidikan di sekolah. tenaga guru yang memadai maka akan membuat pekerjaan utama di sekolah dapat dilaksanakan dengan baik, jika guru sebagai personil utama dalam pengajaran tidak mencapai perbandingan jumlah yang seimbang dengan jumlah siswa maka akan membuat aktifitas pembelajaran di sekoah menjadi stagnan.

Fenomena di atas, menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri 234 Mattirowalie saat ini. Kurangnya jumlah tenaga pendidik di sekolah tersebut berdampak kepada pelaksaanaan proses belajar-mengajar menjadi tidak maksimal karena banyak diantara guru yang harus mengemban tugas ajar lebih dari satu mata pelajaran sehingga terdapat jadilah kemudian guru mengajar tidak relevan dengan latar belakang pendidikanya. Keadaan tersebut menjadi fakta dan sekaligus menjelma menjadi faktor yang tidak mendukung bagi terlaksananya pendidikan tersebut di atas landasan nilai-nilai MPMBS.

c). Terbatasnya sarana-prasarana.Undang-undang Sisdiknas No.20 pasal 46 (2003) menyatakan :

Setiap satua pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Amanah UU di atas sudah seharusnya dilaksanakan secara maksimal semua satuan pendidikan di seluruh nusantara, namun pada tataran realitanya sampai saati ini masih terdapat banyak sekolah yang belum mampu memenuhi standar sarana dan prasarana seperti yang diatur dalam undang-undang sisdiknas. Salah satu sekolah yang termasuk dalam hal itu adalah SD Negeri 234 Mattirowalie sampai saat ini masih diliputi kekurangam sarana dan prasarana pendidikan yang cukup signifikan. Saat ini, kekurangan fasilitas sekolah dapat dilihat dari kurangny sarana-prasaran seperti: kurannya mobiler sekola sehingga mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang nyaman dan tidak menyenangkan, sekolah tidak memiliki tempat ibadah, sekolah tidak mempunyai sumber listrik yang permanen, dan sekolah tidak memiliki ruang laboratorium dan perlatannya yang lengkap.

Dari sejumlah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki SD Negeri 234 Mattirowalie saat ini, menjadi indikasi bahwa sekolah tersebut belum mampu memenuhi standar sarana-prasaran yang diatur dalam UU Sisdiknas dan yang tertian dalam SNP. Sehingga kondisi demikian juga berimplikasi terhadap pelaksanaan manajemen sekolah dengan symbol-simbol MPMBS yang akan mengalami hambatan dalam penerapannya secara maksimal.

d) Kurangnya pelatihan bagi tenaga kerja sekolah. Ilmu dan pengetahuan adalah kunci sukses dalam setiap pekerjaan, semakin banyak ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki maka akan berimplikasi hasil-hasil kerja yang dilaksanakan oleh seseorang. Manusia adalah mahluk yang mebutuhkan pendidikan sepanjang hayat karena manusia pada dasarnya sangat membutuhkan pendidikan untuk dapat beraktifitas dalam kehidupannya dengan produktif.

Bagi segenap pegawai dan guru yang terdapat di SD Negeri 234 Mattirowalie dapat digolongkan sebagai tenaga kerja yang belum memperoleh pendidikan dan pelatihan yang maksimal menyangkut dengan tugas yang diembannya saat ini. Rata-rata guru di sekolah tersebut mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan frekuensi yang sangat minim, demikian pula bagi tenaga staf yang belum pernah sekalipun mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka menambah kapasitas pengetahuannya sehingga merek dapat bekerja dengan efektif.

Kurangnya intensitas pendidikan dan pelatihan bagi seluruh tenaga kerja pendidikan di SD Negeri 234 Mattirowalie menjadi satu diantara banyak faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan mutu pendidikan dengan jalur MPMBS.

1. **Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan MPMBS**

Dilihat dari aspek eksternalnya, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bernuansa MPMBS setiap satuan pendidikan memiliki peluan dan tantangan yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan itu lebih banyak disebakan oleh sistuasi dan kondisi yang terinternalisasi pada setiap sekolah. Khusus untuk SD Negeri 234 Mattirowalie, dianatara yang menjadi faktor-faktor ekternal yang mempenagaruhi dalam mengpelaksanaankan MPMBS adalah

1). Peluang

a) Dukungan finansial. Mencermati perjalanan pelaksanaan MPMBS di Indonesia, perhatian pemerintah dari aspek financial dalam mendudukung penerapan MPMBS di satuan pendidikan dapat dirasakan setelah munculnya kebijakan pemberian dana BOS (Biaya operasional sekolah). Dengan adanya bantuan dana yang diberikan kepada sekolah untuk dikelolah secara mandiri menjadi trend positif bagi penyelenggaraan pendidikan karena sekolah merasa telah memiliki wewenang dalam mendesain rencana pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.

Selain dana BOS, bagi SD Negeri 234 Mattirowalie juga memperoleh bantuan financial dari daerah berupa dana rutin yang khusus diperuntukkan untuk kebutuhan yang bersifat rutin di sekolah. Dengan bantuan tersebut, sekolah semakin enjoy dan sangat terbantu dalam melakukan serangkaian aktifitasnya karena terbukanya kesempatan untuk mengambil keputasan secara otonom yang berhubungan dengan segala hal yang membutuhkan dana dalam merealisasikannya. Seperti perekrutan tenaga honor guru dan pegawai lainnya salah satu kebijakan yang diasumsikan cukup memberi bantuan bagi terselengaranya tugas pendidikan yang berkesinambungan dan sukses.

b) Kebijakan pemerintah. Lahirnya kebijakan pemerintah yang menempatkan sekolah sebagai institusi pendidikan yang memiliki kewenangan dalam menagtur dan mengelola operasional pendidikan khususnya dengan ditetapkannya pola pengelolaan sekolah seperti yang tertuang dalam UU Sisdiknas No 20. (2003) bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.

Kemudian system tata kelola pendidikan dengan MBS dipertegas lagi dalam PP No.19 tentang SNP (2005) yang menyatakan: “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”. Ketetapan dalam Undang-undang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah dalam SNP tersebut menjadi landasan normatif bagi setiap sekolah untuk melaksanakan manajemen sekolah dengan pola MPMBS.

1. **Tantangan**

a). peran serta masyarakat, peran komite sekolah dan dukungan pemerintah setempat yang rendah. Di dalam konsep desentralisasi pendidikan dengan MPMBS dijelaskan bahwa tangungjawab pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, masyarakat, dan sekolah. sehingga jika ingin menghasilkan pendidikan yang dinamis dan efektif seyogyanya dari tiga unsur tersebut saling berkolaborasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembangun di bidang pendidikan.

Fakta kolabarasi pembangunan pendidikan yang menjadi fenomena di SD Negeri 234 Mattirowalie mengisyaratkan bahwa sejauh ini keterlibatan, dukungan, partsipasi, dan sumbangsi dari pemerintah setempat, masyarakat, dan komite sekolah terhadap sekolah memperlihatkan indikasi yang tidak prodikutif. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya karya-karya nyata di kontribusikan dari ketiga komponen tersebut dalam membantu sekolah menyeleggarakan pendidikan yang bermutu.

Komite sekolah sebagai lembaga keterwakilan masyarakat yang dibentuk belum mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai mediator. Demikian halnya dengan masyarakat dan pemerintah setempatnnyang belum mampu memberi kontribusi aktif bagi sekolah, khususnya bagi pemerintah setempat yang tidak memiliki perhatian dan gelagat proaktifnya untuk bekerja sama dengan lembaga satuan pendidikan dalam rangaka membangun pendidikan yang efektif dan efesien.

Fenomena tersebut, menjadi bagian dari akumulasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksanannya pendidikan di SD Negeri 234 Mattirowalie dengan pola-pola Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Hal demikian juga mengakibatkan realisasi cita-cita di sekolah tersebut mengalami hambatan sehingga untuk upaya mewujudkan fakta pendidikan yang berkualitas dan bermutu tinggi sulit direalisasikan.

**Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diulas dalam tesis ini, maka ditarik beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Pelaksanaan MPMBS dalam fungsi-fungsi manajemen sekolah di SD Negeri 234 Mattirowalie sebagian besar telah dilaksanakan namun dalam beberapa fungsi belum berjalan maksimal. Seperti Perencanaan di SD Negeri 234 Mattirowalie, telah dilaksanakan dengan didasarkan kepada tuntutan kebutuhan sekolah dan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan seluruh warga sekolah.
2. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi implementasi MPMBS di SD Negeri 234 Mattirowalie antara lain : Kepemimpinan kepala sekolah, budaya kerja, dan pendanaan, kualitas SDM yang rendah, kurangnya tenaga pendidik, frekuensi dan intensitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja sekolah yang masih kurang, terbatasnya sarana-prasarana. Sementara faktor eksternal berupa adanya kebijakan pemerintah yang mendudukung pelaksanaan MBS, rendahnya peran serta masyarakat dan komite sekolah, seta rendahnya perhatian dan pasifnya pemerintah setempat dalam memberikan dukungan pendidikan.

**Saran Penelitian**

1. Kepada para guru di SD Negeri 234 Mattirowalie, hendaknya senantiasa mengasa diri untuk belajar dengan kreatif dan lebih giat dalam memotivasi dan menempah dirinya sehingga dapat menjadi pendidik yang profesional dan akuntabel;
2. Kepada kepala sekolah seyogyanya dapat meningkatkan kualitas kinerjanya selaku leader dan administrator sekolah, dan kiranya dapat melakukan eksplorasi dalam membangun komunikasi dengan masyarakat agar dalam penyelenggaraam pendidikan di sekolah dapat berjalan efektif dan partipatif;
3. Kepada pengurus komite kirannya dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang didirikan untuk menjadi mitra sekolah dalam membangun pendidikan serta dapat lebih maksimal dalam menunaikan fungsinya selaku pemberi pertimbangan, pendukung, dan mediator bagi sekolah untuk memajukan mutu pendidikan;
4. Kepada segenap masyarakat dan seluruh orang tua siswa agar kiranya dapat memberikan sumbangsi kongkrit dengan meningkatkan kepedulian, keterlibatan, dan rasa tanggungjawab dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SD Negeri 234 Mattirowalie.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ari Kristianawati. 2012. *Mutasi Guru Bernalar Kuli* (Online), (<http://suaraguru.wordpress.com/2012/07/06/mutasi-guru-bernalar-kuli.html>, Diakses 23 April 2013).

Budiyono, Amirullah H. 2004. *PengantarManajemen* Malang: Graha Ilmu.

Dessler. 2005. *Manejemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Prenhallindo.

Handoko, T Hani. 2003. *Manajemen,* Yoyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Hartini, &Herawan, E. 2011.*Manajemen Pendidikan: Manajemen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan,* Bandung: Alfabeta.

Hasibuan, Malayu S.P. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Dasar dan Keberhasilan*. Jakarta: PT. GunungAgung.

 . 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara.

Irianto, Jusuf. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Surabaya: InsanCendekia.

Irianto, Y Bactiar & Sa’ud, U Syaefuddin. 2011. *Manajemen Pendidikan: Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional.* Bandung: Alfabeta.

Komaruddin.1995. *Ensiklopedia Manajemen*. Bandung; Penerbit Alumni.

Mahtika, Hanafi. 2008*. IlmuAdministrasiKonsepdasardanAplikasinya*, Makassar: BadanPenerbit UNM.

Manullang, M. 2005. *Dasar–Dasar Manajemen.* Medan : GadjahMada University Press.

Moleong, Lexy, J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Remaja Rosda Karya

Mulyati, Yati Siti & Komariah, Aan. 2011. *ManajemenPendidikan: ManajemenSekolah.* Bandung: Alfabeta.

NgalimPurwanto, Drs. M..1998, *AdministrasidanSupervisiPendidikan,* Bandung: PT RemadjaRosdakarya.

<http://nasuprawoto.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-sekolah-dasar>  <http://yuliana.media.diknas.go.id/media/documen/5755.pdf>

Purwanto, M. Ngalim. 2008. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*.  Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Santori, Djam’an. 2010. *Problematika Pendidikan Dasar*. Bandung: Ilmu Cahaya Hati. . 2010. Asas-Asas Manajemen. Bandung: Man.